

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Mangrove

Community Participation in Mangrove Management

Oleh:

Desrian Alfandi¹, Rommy Qurniati^{1*}, Indra Gumay Febryano¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jalan Soemantri Brojonegoro No 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145, Lampung, Indonesia. Tel.: +62-721-704946, Fax.: +62-721-770347

*Email: rommy.qurniati@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan mangrove karena masyarakat merupakan garda terdepan dalam menjaga kelestarian mangrove. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat dan tipe partisipasi Kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan dalam pengelolaan mangrove. Penelitian telah dilakukan pada bulan Januari-Februari tahun 2018 di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan Provinsi Lampung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan terstruktur kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan Teori Arstein dan Hobley. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat partisipasi terapi dan tipe partisipasi pasif. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak pada tahap perencanaan sampai pelaksanaan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: mangrove, partisipasi masyarakat, tipe partisipasi, tingkat partisipasi

ABSTRACT

Community participation has an important role in mangrove management because the community is the front guard in maintaining the sustainability of mangroves. This study aims to determine the level and type of participation of Kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan (a mangrove group). The research was conducted in January-February 2018 in Sidodadi Village, Teluk Pandan Subdistrict, Pesawaran District, Lampung Province. Data obtained through in-depth and structured interviews were then analyzed qualitatively using Arstein and Hobley Theory. The results show that community participation is at the level of therapeutic participation and the type of passive participation. The involvement of various parties in the planning stage to implementation is needed to encourage increased community participation.

Keyword: *community participation, level of participation, mangrove, type of participation*

PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan keterlibatan atau ikutsertaan pada pengambilan bagian dalam sebuah diskusi yang dilakukan dengan aktif dan sengaja (Rizal dan Rahayu 2012; Suprayitno *et al* 2012). Peningkatan partisipasi masyarakat juga berguna dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat berbeda-beda disetiap wilayah sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakatnya. Masyarakat merupakan faktor penentu dalam menjalankan dan partisipasi pada pengelolaan hutan mangrove secara

lestari (Febryano *et al* 2014). Pada umumnya yang terjadi dimasyarakat penerapan pengetahuan lokal untuk konservasi tanaman mangrove (Salampessy *et al* 2015).

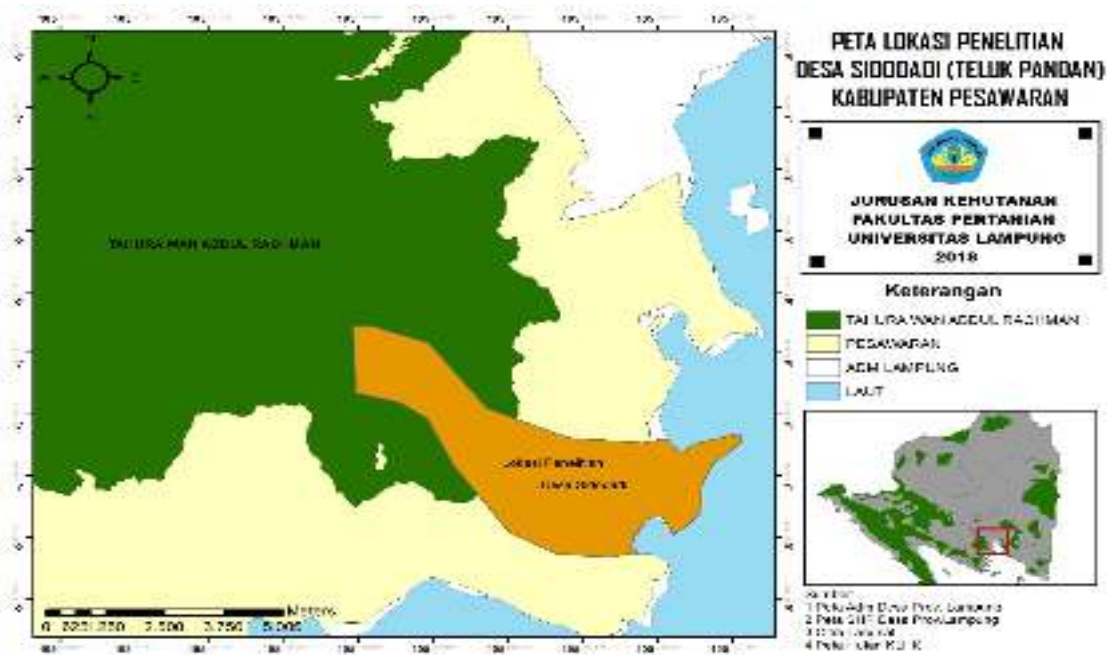
Mangrove memiliki peran penting baik dari segi ekologis maupun ekonomis (Fadhila *et al* 2015). Kerusakan tanaman mangrove yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar mangrove. Rusaknya tanaman mangrove berdampak pada masyarakat karena tanaman mangrove merupakan daerah pencarian makan bagi ikan (Febryano *et al* 2015). Kurangnya ketertarikan masyarakat dalam pengelolaan mangrove baik secara pribadi maupun kelompok dengan anggota masyarakat lainnya dapat menghambat keberlangsungan mangrove (Qurniati *et al* 2017a).

Peneliti lain telah banyak melakukan penelitian tentang partisipasi masyarakat. Ruhimat (2013) mengukur tingkat partisipasi masyarakat di KPH Model Kabupaten Banjar menggunakan berbagai tahap yaitu tingkat kapabilitas masyarakat, peluang bagi masyarakat, dan dorongan kepada masyarakat; Sudrajat *et al* (2016) untuk mengetahui keikutsertaan masyarakat pada hutan rakyat pada absensi kegiatan penyuluhan dan kompetensi; dan Tanjung *et al* (2017) mengetahui keikutsertaan masyarakat petani hutan di tahap perencanaan tahap awal kegiatan, aplikasi kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan, dan keuntungan dari hasil kegiatan, akan tetapi kegiatan Penelitian–penelitian tersebut hanya bersifat segmental dan hanya dilihat dari salah satu konsep keikutsertaan.

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di Desa Sidodadi sudah pernah dilakukan oleh Harja (2001). Pada rentan waktu tersebut, dimungkinkan terjadi perubahan sikap dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan mangrove akibat adanya program-program dari pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, perlu pengkajian ulang terhadap partisipasi masyarakat dengan menggunakan dua teori sekaligus. Penggunaan dua teori diharapkan dapat memberikan ukuran partisipasi masyarakat secara menyeluruh dan kompleks, sehingga penelitian ini penting dilakukan. Penelitian sebelumnya yang telah menggunakan kedua teori tersebut antara lain dilakukan Desmiwati (2016) yang mengukur partisipasi dan persepsi masyarakat petani penggarap di hutan dan Jariyah (2014) yang mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi lahan. Berdasarkan pernyataan di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa tingkat partisipasi dan tipe partisipasi kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan. Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pengelolaan mangrove dilakukan dalam upaya untuk menjaga kelestariannya. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pengelolaan hutan mangrove yang berakibat positif dan negatif. Penelitian ini melibatkan kelompok yang bergerak dalam pengelolaan mangrove yaitu Kelompok Paguyuban Peduli Lingkungan (PAPELING). Penelitian dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung selama 2 bulan yaitu pada bulan Januari–Februari 2018 (Gambar 1). Pemilihan lokasi ini karena terdapat kelompok masyarakat yang memanfaatkan mangrove.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Analisis pada tingkat partisipasi masyarakat menggunakan delapan tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan Teori Arnstein (1969), sedangkan tipe partisipasi masyarakat menggunakan tujuh tipe partisipasi masyarakat berdasarkan Teori Hobley (1969). Teori Arnstein (1969) menjelaskan bahwa besarnya partisipasi masyarakat lebih mengutamakan pada hubungan korespondensi di dalam masyarakat, kelompok dan pemerintah ataupun lembaga terkait lainnya, sedangkan Teori Hobley (1969) menjelaskan bahwa tipe partisipasi dilihat dari keterlibatan secara langsung.

Teori partisipasi Arnstein (1969) digunakan untuk menganalisis keterlibatan kelompok PAPELING dan pemerintah dalam pengelolaan mangrove. Responden yang akan dianalisis dengan Teori Arnstein (1969) dipilih dari anggota kelompok PAPELING menggunakan teknik *snowball sampling* dan didapatkan sebanyak 5 responden. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam terkait pengelolaan mangrove, karena kelompok tersebut saat ini sudah tidak banyak aktif dalam pengelolaan mangrove. Teori partisipasi Hobley (1969) digunakan untuk menganalisis keterlibatan kelompok dalam pengelolaan mangrove dan pemahaman tentang mangrove. Responden yang akan dianalisis dengan Teori Hobley (1969) diambil dari seluruh anggota kelompok PAPELING yang berjumlah 33 orang. Namun, hasil dilapangan didapatkan responden sebanyak 27. Hal ini dikarenakan ada beberapa anggota kelompok yang berpindah tempat tinggal dan ada pula yang meninggal dunia. Hasil analisis dimuat dalam bentuk tabulasi untuk memudahkan analisa, sehingga dapat terlihat bagaimana partisipasi kelompok PAPELING dalam pengelolaan mangrove.

Tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan Teori Arnstein (1969) diukur menggunakan delapan tingkat yang diurutkan dari yang terendah ke tertinggi yaitu partisipasi manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, peredaman, kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat. Tingkat partisipasi berdasarkan Teori Arnstein (1969) yang diukur pada penelitian ini adalah keterlibatan kelompok PAPELING dalam pengelolaan mangrove seperti aktivitas, kegiatan, peran anggota dalam penyusunan rencana kerja, dan peran anggota dalam pengambilan keputusan, sedangkan keterlibatan pemerintah diukur melalui beberapa

hal, seperti pihak pemerintah yang terlibat, peran pemerintah dalam kelompok dan bentuk perlibatan dalam kelompok PAPELING.

Tipe partisipasi berdasarkan Teori Hobley (1969) diukur menggunakan tujuh tipe partisipasi yaitu partisipasi manipulatif, pasif, melalui konsultasi, untuk insentif, fungsional, interaktif dan inisiatif. Tipe partisipasi masyarakat yang diukur berdasarkan Teori Hobley (1969) dalam penelitian ini adalah anggota kelompok dalam pengelolaan mangrove seperti keikutsertaan, motivasi, peran anggota kelompok dalam kegiatan, peran dalam perumusan rencana kerja dan pemahaman tentang mangrove.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Kelompok PAPELING dan Tingkat Partisipasi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, kelompok PAPELING termasuk dalam partisipasi terapi. Indikator yang digunakan dalam partisipasi terapi adalah komunikasi antara pihak kelompok PAPELING, masyarakat dan pemerintah. Pada partisipasi terapi, pemerintah memiliki peran penting dalam pengelolaan mangrove. Komunikasi beberapa pihak sudah terbangun sejak lama namun masih sangat terbatas. Informasi dan inisiatif datang satu arah hanya dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan kelompok PAPELING tidak dapat mengembangkan aspirasi dan hanya mengandalkan program dari pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Idajati *et al* (2016) dengan menggunakan metode yang sama namun diperoleh hasil berbeda pada pemerintah, tetapi memiliki kesamaan pada masyarakat yaitu tingkat partisipasi pemerintah dan pihak swasta berada di tahap pendelegasian kekuasaan (*delegated power*) sedangkan untuk masyarakat terhadap perencanaan ekowisata masih pada tahap terapi (*therapy*). Perbedaan partisipasi pada pemerintah ini terjadi karena keterlibatan pemerintah di Desa Sidodadi dalam penyusunan rencana kerja hanya terpusat pada pemerintah dan ketua kelompok; sedangkan penelitian Idajati *et al* (2016) menyebutkan bahwa penyusunan rencana pengembangan, dan pengawasan telah dilakukan oleh beberapa pihak.

Keterlibatan Kelompok PAPELING dalam Pengelolaan Mangrove

Kelompok PAPELING dibentuk pada tanggal 16 Maret 2000 dengan ruang lingkup kegiatan meliputi pemanfaatan dan pelestarian hutan mangrove. Inisiasi pembentukannya dilakukan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang prihatin terhadap kondisi mangrove yang rusak akibat alih fungsi lahan mangrove menjadi lahan tambak dan penebangan mangrove secara massal untuk diambil kayunya. Kegiatan kelompok PAPELING diawali pada tahun 2005 dengan melakukan penanaman dan pembibitan untuk rehabilitasi mangrove didesanya. Pembibitan tersebut masih berskala kecil yaitu hanya terdiri dari beberapa bedeng bibit saja. Seiring dari banyaknya permintaan bibit mangrove, kelompok tersebut mulai mengembangkan pembibitan dengan skala yang lebih besar hingga mencapai satu juta bibit. Hasil kerja keras yang dilakukan pada saat itu menghantarkan kelompok PAPELING mendapatkan penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi Lampung pada tahun 2006.

Saat ini kelompok PAPELING sudah tidak aktif dalam pengelolaan mangrove. Pertemuan kelompok tidak dilakukan sejak tahun 2012. Pertemuan dan kehadiran anggota kelompok termasuk dalam kategori partisipasi manipulasi (Tabel 1). Partisipasi manipulasi ini diartikan tidak adanya hubungan komunikasi antar pihak ataupun dialog karena sudah tidak aktif melakukan pertemuan perkelompok. Beberapa anggota kelompok tidak mengetahui apakah masih berstatus anggota atau tidak karena tidak pernah dilakukan pertemuan.

Sampai saat ini pembibitan mangrove di Desa Sidodadi masih berjalan, tetapi kegiatan tersebut merupakan usaha mandiri, bukan milik kelompok. Pembibitan tersebut dilakukan 1 tahun sekali dengan menggunakan tenaga kerja dari anggota agar kelompok PAPELING

terlihat seperti memiliki kegiatan. Pekerjaan yang melibatkan anggota kelompok dan masyarakat terdiri dari kegiatan mencari *propagul* mangrove, mengisi media tanam ke *polybag* dan memasukkan *propagul* media tanam. Kegiatan mencari *propagul* yang membutuhkan tenaga besar dilakukan oleh pria, sedangkan wanita dan anak-anak berperan mengisi media tanam ke *polybag*. Kegiatan pembibitan mangrove didominasi oleh wanita karena lebih teliti dibandingkan dengan pria (Qurniati *et al* 2017a).

Tabel 1. Aktivitas kelompok dalam pemanfaatan dan pelestarian mangrove dan tingkat partisipasinya berdasarkan teori Arnstein

Indikator	Keterangan	Tingkat Partisipasi
Pertemuan kelompok	Tidak pernah dilakukan pertemuan kelompok sejak 2012	Partisipasi Manipulasi
Dukungan dari anggota kelompok	Masyarakat hanya berkontribusi dalam hal tenaga tidak berupa materi	Partisipasi Terapi
Kehadiran anggota pada pertemuan	Masyarakat sulit untuk hadir dalam pertemuan karena memiliki pekerjaan lain	Partisipasi Manipulasi
Kegiatan	Kegiatan pembibitan mangrove dilakukan 1 tahun sekali	Partisipasi Terapi
Usulan program	Usulan program hanya dari pemerintah dan ketua kelompok	Partisipasi Terapi
Rencana kerja kelompok	Anggota kelompok hanya dilibatkan dalam pelaksanaan sedangkan untuk perencanaan tidak dilibatkan	Partisipasi Terapi
Keterlibatan anggota dalam penyelesaian masalah	Penyelesaian masalah hanya diselesaikan oleh ketua kelompok	Partisipasi Informasi
Keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan	Masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan	Partisipasi Terapi

Sumber : Data Primer

Anggota kelompok yang terlibat dalam kegiatan pembibitan akan memperoleh imbalan. Besarnya imbalan yang diterima anggota kelompok dihitung dari banyaknya jumlah *polybag* yang diisi ke media tanam dan *propagul* yang dikumpulkan. Pada umumnya masyarakat bersemangat untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan karena mengharap akan memperoleh imbalan berupa uang atau materi lain (Aheto *et al* 2016).

Usulan program, rencana kerja serta keterlibatan anggota kelompok dalam pengambilan keputusan tergolong dalam tingkat partisipasi terapi (Tabel 1). Hal ini disebabkan oleh komunikasi antara pihak anggota kelompok dengan pemerintah telah dilakukan, akan tetapi anggota kelompok terkesan hanya menerima usulan tanpa adanya tanggapan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program dibutuhkan untuk memberikan usulan, tanggapan serta merubah pandangan masyarakat yang hanya sebagai pelaksana (Winata dan Yuliana, 2012).

Rencana kerja atau program kelompok PAPELING merupakan program yang berasal dari pemerintah dan atas usulan dari ketua kelompok. Anggota kelompok tidak ikut berpartisipasi

secara aktif dalam pembuatan program. Biasanya, anggota kelompok hanya diundang saat akan mengadakan kegiatan. Oleh karena itu, keterlibatan anggota kelompok PAPELING dalam pembuatan rencana kerja atau program tergolong dalam partisipasi terapi (Tabel 1).

Penyelesaian masalah dalam kelompok PAPELING tergolong partisipasi informasi. Partisipasi tersebut sudah ada komunikasi tetapi masih bersifat satu arah dan tidak ada timbal balik. Informasi diberikan kepada masyarakat namun masyarakat tidak diberi kesempatan untuk melakukan tanggapan. Hal ini disebabkan dalam penyelesaian masalah dilakukan oleh ketua kelompok tanpa adanya bantuan dari anggotanya. Masalah yang terjadi biasanya hanya diterima oleh ketua kelompok dan tidak dibagikan ke anggota untuk mencari solusi.

Peran anggota kelompok dalam pengambilan keputusan tergolong dalam partisipasi informasi. Pada partisipasi tersebut komunikasi antara kelompok dengan pemerintah masih terbatas dan satu arah yaitu dari pemerintah, sehingga proses penyampaian informasi antar beberapa pihak tidak berjalan secara optimal. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Wihandoko (2015), masyarakat berperan dalam memberikan aspirasi untuk menentukan hasil keputusan, namun pemerintah yang menetapkan keputusan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Damastuti dan Groot (2017), bahwa pemerintah memegang kendali penuh atas program yang dijalankan, masyarakat hanya dilibatkan pada saat program saja. Selain itu, tingkat pendidikan anggota kelompok diduga menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat (Diartho *et al* 2012; Hakim dan Darusman 2015; Mamuko *et al* 2016; Sawerah *et al* 2016).

Tingkat pendidikan masyarakat tergolong rendah, karena pendidikan masyarakat didominasi 35% lulusan SD dan tidak lulus SD dengan persentase 17%. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menerapkan inovasi yang dikenalkan. Upaya-upaya pendekatan perlu dilakukan ke anggota kelompok berupa penyuluhan atau pendampingan, agar dapat meningkatkan pemahaman serta partisipasinya.

Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Mangrove

Keterlibatan pemerintah dibutuhkan oleh kelompok PAPELING dalam memenuhi sarana dan prasarana pengelolaan mangrove (Tabel 2). Keterlibatan pemerintah yang dianalisis menggunakan Teori Arnstein (1969) berupa pihak-pihak pemerintah yang terlibat, jenis bantuan yang diberikan, peran pemerintah dalam pengambilan keputusan serta peran pemerintah dalam kelompok.

Tabel 2. Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan mangrove dan tingkat partisipasinya berdasarkan Teori Arnstein

Indikator	Keterangan	Tingkat Partisipasi
Pemerintah yang terlibat	Pihak yang terlibat adalah pemerintah yaitu BPDAS Way Seputih	Partisipasi Terapi
Peran pemerintah dalam kelompok	Sebagai fasilitator berupa dana dan program kegiatan	Partisipasi Terapi
Bentuk keterlibatan	Kerjasama dalam program pembibitan mangrove	Partisipasi Terapi
Jenis bantuan yang diberikan	Bantuan yang diberikan berupa dana dan program kegiatan	Partisipasi Informasi
Peran pemerintah dalam pengambilan keputusan	Semua informasi dan saran bersumber dari pihak pemerintah, kelompok hanya sebagai penerima program dan menjalankannya	Partisipasi Informasi

Sumber : Data Primer

Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan mangrove adalah pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pengusaha (Roy, 2014; Amal dan Baharudin, 2016; Febryano *et al* 2017). Pihak-pihak pemerintah yang terlibat diantaranya Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Way Seputih Way Sekampung, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM)-II dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Menurut Fitriadi *et al* (2005) hal yang dapat dilihat dari partisipasi pemerintah adalah dari pendanaan, pelaksanaan kegiatan dan peran pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan mangrove berupa program pembibitan dan pengadaan bibit yang digunakan untuk penanaman serta dana untuk kebutuhan kegiatan. Dana yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk menunjang kegiatan pembibitan, misalnya pengadaan *polybag*, penyiapan media tanam serta upah tenaga kerja masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cesario *et al* (2015), bahwa peran pemerintah di Desa Margasari dalam pengelolaan mangrove dengan pemberian bantuan materi berupa pengadaan *polybag* dan penyuluhan untuk menunjang pelestarian mangrove.

Pemerintah memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini mengakibatkan pengambilan keputusan berada di pihak pemerintah dan kelompok hanya menjalankan apa yang telah diputuskan. Keterlibatan pemerintah tergolong dalam kategori partisipasi terapi. Kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan anggota kelompok mengakibatkan peran pemerintah masih kurang diharapkan oleh masyarakat pada pengelolaan mangrove (Qurniati *et al* 2017b).

Tipe Partisipasi Kelompok PAPELING

Tipe partisipasi masyarakat berdasarkan Teori Hopley (1969) berada pada tipe partisipasi pasif. Indikator yang dilihat dari partisipasi ini adalah partisipasi tanpa keterlibatan langsung dari anggota perihal yang telah diputuskan. Anggota kelompok menerima keputusan yang telah dibuat dan dianggap terlibat dalam pembuatan keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa anggota kelompok masih rendah keterlibatannya dalam pengelolaan mangrove. Berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Jariyah (2014) dengan metode yang sama bahwa partisipasi masyarakat di Desa Ngadipuro termasuk kedalam partisipasi insentif yaitu masyarakat memberikan dukungan berupa sumber daya, tenaga kerja dan dukungan pangan. Dukungan dari beberapa pihak dibutuhkan untuk mendorong partisipasi. Keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi serta melibatkan anggota kelompok dalam mengelola mangrove terutama di Kabupaten Pesawaran. Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh kurangnya upaya pengelolaan yang dilakukan bersama dari berbagai pihak (Sinery dan Manusawai 2016).

Keterlibatan Anggota Kelompok PAPELING dalam Pengelolaan Mangrove

Keikutsertaan, motivasi serta perlibatan anggota kelompok tergolong partisipasi pasif karena rendahnya keterlibatan dalam pengelolaan mangrove (Tabel 3). Pada partisipasi pasif, tidak ada keterlibatan anggota dalam perencanaan kegiatan, namun anggota dianggap mengetahui dan menyetujui atas perencanaan yang telah dibuat. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan mangrove berdasarkan atas kehendak sendiri tetapi ada pula sebagian yang ikut karena ajakan orang lain. Selain itu, anggota kelompok menganggap dengan mengikuti kegiatan maka akan menerima imbalan.

Berdasarkan data karakteristik, jumlah tanggungan masyarakat tergolong sedang sebesar 48% yaitu 4 sampai 5 anggota dalam satu keluarga. Banyaknya jumlah tanggungan yang dimiliki pada satu keluarga. Hal ini menyebabkan anggota keluarga harus lebih bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan. Salah satunya adalah dengan cara melibatkan anggota keluarganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembibitan mangrove. Agar semakin banyak anggota keluarga yang terlibat maka imbalan uang yang diperoleh semakin banyak. Sejalan

dengan penelitian Linoria *et al* (2016) yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah tanggungan dalam satu keluarga, maka dapat mempengaruhi semangat anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Tabel 3. Peran anggota kelompok dan keikutsertaan dalam pengelolaan mangrove serta tipe partisipasi berdasarkan Teori Hobbey

Indikator	Keterangan	Tipe Partisipasi
Keikutsertaan	Anggota terlibat dalam pengelolaan mangrove atas kehendak sendiri hanya sebagian yang ikut karena ajakan orang lain	Partisipasi Pasif
Motivasi	dengan terlibat dalam pengelolaan mangrove akan mendapatkan imbalan	Partisipasi Pasif
Peran dalam kegiatan	anggota hanya sebatas pekerja dalam kegiatan, tidak dilibatkan dalam hal perencanaan	Partisipasi Manipulatif
Perlibatan dalam perumusan rencana kerja	Pengambilan keputusan anggota tidak dilibatkan, hanya menjalankan keputusan yang telah dibuat	Partisipasi Pasif

Sumber : Data Primer

Kegiatan yang diikuti oleh anggota kelompok adalah kegiatan pembibitan mangrove, namun anggota hanya dilibatkan pada saat kegiatan yaitu sebagai pekerja. Kontribusi yang diberikan oleh anggota kelompok berupa tenaga, sedangkan untuk kontribusi berupa dana ataupun materi masih sangat kurang. Salah satu responden menyatakan bahwa "*saya hanya bisa membantu jika diikutsertakan, tetapi untuk memberikan dana saya belum bisa karena buat kehidupan sehari-hari saja masih susah*". Seperti halnya pada penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan dkk (2015), peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hanya memberikan bantuan berupa tenaga, sedangkan untuk uang ataupun pemikiran masih kurang. Kondisi berbeda terdapat pada penelitian Gumilar (2012) tentang masyarakat pesisir di Kabupaten Indramayu yang berkontribusi dalam kegiatan pengelolaan mangrove tidak hanya berupa tenaga dan waktu melainkan pikiran dan juga dana (materi). Keterlibatan masyarakat ini enurut Roy *et al* (2013) diperlukan untuk menurunkan degradasi hutan mangrove.

Masyarakat Desa Sidodadi belum dapat melakukan pemberian bantuan materi karena rata-rata pendapatan masyarakat masih rendah yaitu 37% berpenghasilan di bawah Rp.1.000.000,- dan 33% kurang dari Rp.2.000.000,-, sedangkan 30% masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp.3.000.000,-. Padahal, semakin tinggi pendapatan masyarakat maka hubungan masyarakat dalam pengelolaan hutan akan semakin meningkat. Hubungan tersebut berupa pemanfaatan, pengelolaan dan pemanenan hasil hutan (Sukardi, 2017).

Desa Sidodadi memiliki sumber daya manusia yang melimpah, namun tidak diimbangi dengan keinginan untuk mengambil peran dalam melestarikan mangrove. Hal ini terlihat dari tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan kegiatan. Anggota kelompok tergolong kategori dewasa pertengahan yaitu sebanyak 55% dimana hal ini adalah usia produktif. Usia produktif pada masyarakat harus dimanfaatkan karena berpeluang untuk mengubah persepsi masyarakat ke arah yang lebih baik (Hamdan *et al* 2017). Oleh karena itu, masyarakat yang berusia produktif diharapkan memiliki keterlibatan lebih banyak dalam perencanaan dan pengelolaan mangrove, namun kenyataannya keterlibatan masih sangat rendah dan hanya sebatas pelaksana.

Pemahaman Anggota Kelompok tentang Mangrove

Anggota kelompok telah mengetahui manfaat mangrove baik dari ekonomi dan ekologi. Manfaat ekonomi yang dirasakan adalah mangrove sebagai tempat tinggal biota laut. Manfaat

ini dirasakan oleh masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan yang biasanya mengambil ikan dan kepiting disekitar mangrove. Manfaat ekologi yang dirasakan adalah dengan adanya mangrove masyarakat dapat terhindar dari bencana alam karena dahulunya pernah terjadi bencana alam yaitu banjir rob yang merugikan masyarakat.

Manfaat tersebut terjadi perbedaan antara anggota kelompok yang telah lama tinggal maupun anggota yang baru tinggal. Berdasarkan data karakteristik responden lama tinggal masyarakat, 41% masyarakat telah tinggal selama 31 sampai 40 tahun menganggap dirinya sudah mengerti dan paham tentang manfaat mangrove, sedangkan untuk yang tinggal 11 sampai 20 tahun masyarakat mengikuti kegiatan mangrove sebagai ikutan ataupun ajakan dari orang lain. Berbeda halnya Rahadiani *et al* (2014), menyatakan bahwa lama tinggal tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari aktivitas dan cara pandang masyarakat terhadap pelestarian mangrove (Tabel 4).

Tabel 4. Pemahaman anggota kelompok terhadap mangrove

Indikator	Keterangan
Manfaat mangrove	Sudah mengerti manfaat mangrove dari ekologi dan ekonomi
Kondisi mangrove	Kondisi mangrove dinilai masyarakat baik, sudah tidak ada lagi pencurian kayu serta pembukaan lahan mangrove untuk dikonversi
Peraturan undang-undang tentang mangrove	Anggota hanya mengetahui bahwa mangrove tidak boleh diambil kayunya
Cara masyarakat melestarikan mangrove	anggota dalam melestarikan mangrove melakukan penanaman dan penyulaman mangrove serta tidak mengambil kayunya.

Sumber : Data Primer

Kondisi mangrove menurut anggota kelompok sudah baik karena sudah tidak ada yang mengambil kayu untuk dijadikan kayu bakar. Anggota kelompok sudah memahami pentingnya mangrove sebagai pelindung desa dari intrusi air laut. Selain itu, anggota kelompok telah mengetahui peraturan perundang-undangan tentang mangrove penyuluh kehutanan. Pemahaman ini menjadi dasar untuk berpartisipasi dalam pengelolaan mangrove. Semakin banyak pengetahuan dan pemahaman tentang mangrove maka akan semakin tinggi pula partisipasi masyarakat.

SIMPULAN

Partisipasi kelompok PAPELING tergolong dalam partisipasi terapi dan pasif. Dicitrakan dengan sudah terbangun komunikasi walaupun masih terbatas dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan masih rendah. Informasi dan inisiatif hanya datang dari satu arah yaitu pemerintah dan pihak luar lainnya. Anggota kelompok hanya dilibatkan ketika ada kegiatan pembibitan dan hanya sebagai pekerja. Peran pemerintah yang masih *top down* mengakibatkan masyarakat terbatas ruang gerak dalam pengelolaan mangrove dan pada saat menyampaikan aspirasi. Peningkatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Aheto DW., Kankam S., Okyere I., Mensah E., Osman A., Jonah F E., dan Mensah J C. 2016. Community Based Mangrove Forest Management: Implication for Local Livelihoods

- and Coastal Resource Conservation Along the Volta Estuary Catchment Area of Ghana. *Jurnal Ocean and Coastal Management* 127:43-54.
- Amal dan Baharudin II. 2016. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Scientific Pinisi* 2(1): 1-7.
- Arnstein S. 1969. A Ladder of Participation. *Jurnal American Institute of Planners* 35(4) : 216-224.
- Cesario AE., Yumono SB., dan Qurniati R. 2015. Partisipasi Kelompok Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari* 3(2): 21-30.
- Damastuti E., dan Groot RD. 2017. Effectiveness Of Community Based Mangrove Management For Sustainable Resource Use And Livelihood Support: A Case Of Study Of Four Villages In Central Java, Indonesia. *Jurnal Environmental Management* 203: 510-521.
- Desmiwati. 2016. Studi Tentang Persepsi dan Tingkat Partisipasi Petani Penggarap di Hutan Penelitian Parungpanjang. *Jurnal Perbenihan Tanaman Hutan* 4(2): 109-124.
- Diarto, Hendrarto B., dan Suryoko S. 2012. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Kawasan Hutan Mangrove Tugurejo di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 10(1): 1-7.
- Fadhila H., Saputra SW., dan Wijayanto D. 2015. Nilai Manfaat Ekonomi Ekosistem Mangrove di Desa Kartika Jaya, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Management Of Aquatic Resources* 4(3): 180-187.
- Febryano IG., Suharjito D., Darusman D., Kusmana C., dan Hidayat A. 2014. The Roles And Sustainability Of Local Institutions Of Mangrove Management In Pahawang Island. *Jurnal Management Hutan Tropika* 20(2): 69-76.
- Febryano IG., Suharjito D., Darusman D., dan Kusmana C. 2015. Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 12(2): 123-138.
- Febryano IG., Sinurat J., dan Salampessy ML. 2017. Social Relation Between Businessman And Community In Management Of Intensive Shrimp Pond; Prosiding IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 55:1-7.
- Fitriadi., Gunawan T. dan Rijanta. 2015. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam rehabilitasi hutan mangrove: Kasus di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. 12(3): 122-129.
- Gumilar I. 2012. Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Akuatika* 3(2): 198-211.
- Hakim AM. dan Darusman D. 2015. Persepsi, Sikap dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur. *Jurnal Bonoworo Wetlands* 5(2): 85-93.
- Hamdan, Achmad A., dan Mahbub AS. 2017. Persepsi Masyarakat Terhadap Status Kawasan Suaka Margasatwa Ko'mara Kabupaten Takalar. *Jurnal Hutan dan Masyarakat* 9(2): 105-113.
- Harja HR. 2001. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Mangrove (Studi Kasus di Desa Durian dan Desa Sidodadi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan. Tesis. Institut Pertanian Bogor. 71p.
- Hobley M. 1969. *Participatory Forestry: The Forestry Of Change In India And Nepal*. Buku. In Rural Development Forestry Study Guide 3. London. 284p.
- Idajati H., Pamungkas A., dan Kukinul VS. 2016. The Level Of Participation In Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya. *Jurnal Social and Behavior Sciences* 227:515-520.

- Jariyah NA. 2014. Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah di Sub DAS Kedaung, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 11(3): 211-221.
- Kurniawan MA., Soemarno, dan Purnomo M. 2015. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang, Jombang. *Jurnal Pembangunan dan Alam Lestari* 6(2): 89-98.
- Linoria RMM., Dewantara I., dan Ardian H. 2016. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan di Desa Tanggai Jaya Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari* 4(4): 453-462.
- Mamuko F., Walangian H., dan Tilaar W. 2016. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat alam Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Eugenia* 22(2): 80-92
- Qurniati R., Hidayat W., Kaskoyo H., dan Inoue M. 2017a. Social Capital In Mangrove Management: A Case Study In Lampung Province, Indonesia. *Jurnal Forest and Enviromental Science* 33(1): 8-21.
- Qurniati R., Febryano IG., dan Zulfiani D. 2017b. How Trust Influence Social Capital To Support Collective Action In Agroforestry Development. *Jurnal Biodiversitas* 18(3): 1201-1206.
- Rahadiani AASD., Dharma IGBS., dan Norken IN. 2014. Partisipasi Masyarakat Sekitar Danau Beratan dalam Konservasi Sumber Daya Air. *Jurnal Spektran* 2(2): 41-49.
- Rizal M., dan Rahayu SP. 2015. Tingkat Partisipasi Petani dalam Kelompok Tani Padi Sawah untuk Mendukung Program M-P3MI di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *Prosiding* 1(2): 352-357.
- Roy AKD., Alam K., dan Gow J. 2013. Community Perceptions Of State Forest Ownership And Management: A Case Study Of The Sundarbans Mangrove Forest In Bangladesh. *Jurnal Environmental Management* 117:141-149.
- Roy AKD. 2014. Determinants Of Participation Of Mangrove Dependent Communities In Mangrove Conservation Practices. *Jurnal Ocean and Coastal Management* 98: 70-78.
- Ruhimat SI. 2013. Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Studi Kasus di KPH Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 10(3): 255-267.
- Salampessy ML., Febryano IG., Martin E., Siahaya ME., dan Papilaya R. 2015. Cultural Capital Of The Communities In The Mangrove Conservation In The Coastal Areas Of Ambon Dalam Bay, Moluccas, Indonesia. *Procedia Environmental Sciences* 23: 222-229.
- Sawerah S., Muljono P., dan Tjitropranoto P. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Penyuluhan* 12(1): 89-102.
- Sinery AS., dan Manusawai J. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengelolaan Hutan Lindung Wosi Rendani. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23(3): 394-401.
- Sudrajat A., Hardjanto., dan Sundawati L. 2016. Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari, Kasus di Desa Cikeusal dan Desa Kananga, Kabupaten Kuningan. *Jurnal Silvikultur Tropika* 7(1) : 8-17.
- Sukardi. 2017. Analisis Pendapatan Masyarakat Desa untuk Kelestarian Hutan Lindung (Studi Hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Hutan dan Kemasyarakatan* 9(1): 44-53.
- Suprayitno RA., Sumardjo., dan Sugihen BG., 2012. Motivasi dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Hutan Kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Penyuluhan* 8(2): 182-196.

- Tanjung SN., Sadono D., dan Wibowo CT. 2017. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Nagari di Sumatera Barat. *Jurnal Penyuluhan* 13(1): 14-30.
- Wihandoko A. 2015. Persepsi dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Mandiri) di Kabupaten Mesuji (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Raya). *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 4(2): 167-190.
- Winata A., dan Yuliana E. 2012. Tingkat Partisipasi Petani Hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perhutani. *Jurnal Mimbar* 28(1): 65-76.